



Verifikasi Data Kepemilikan Manfaat

Risalah Kebijakan

Mei 2020

Ringkasan 2

Verifikasi pada saat pengiriman 5

Memastikan kesesuaian 5

Memastikan nilainya nyata dan ada 6

Memeriksa bukti pendukung 6

Memverifikasi pengirim 7

Verifikasi setelah pengiriman 8

Memastikan data sering diperiksa 8

Memastikan data selalu mutakhir 9

Memastikan penyelidikan terhadap informasi yang diduga tidak benar 9

Sanksi 11

Kesimpulan 12



Ringkasan

Untuk memaksimalkan dampak register kepemilikan manfaat, pengguna dan pihak berwenang harus memiliki keyakinan bahwa data yang tercantum dalam register secara luas mencerminkan realitas yang sesungguhnya dan terkini mengenai pemilik atau pengendali perusahaan tertentu.

Verifikasi merupakan **kombinasi antara pemeriksaan dan proses** yang dipilih oleh aturan pengungkapan tertentu untuk memastikan bahwa data kepemilikan manfaat berkualitas tinggi, yakni akurat dan lengkap pada suatu waktu tertentu.

Verifikasi meliputi pembuatan sistem untuk memeriksa bahwa informasi yang dikirimkan ke register minimal masuk akal; tampak dalam format yang benar; bebas dari penghilangan; sudah disediakan oleh pihak berwenang yang relevan; dan idealnya bebas dari segala kesalahan dan kepalsuan.

Untuk sebagian besar perusahaan dengan struktur kepemilikan yang relatif sederhana, penentuan dan verifikasi kepemilikan manfaat (BO) mereka akan terasa relatif mudah. Penentuan BO akan lebih sulit bagi sebagian kecil

perusahaan dengan struktur kepemilikan yang kompleks dan sering kali lintas negara yang meliputi berbagai macam badan hukum. Dalam kasus semacam ini, kepastian 100% bahwa data BO yang diungkapkan merepresentasikan gambaran yang akurat dan lengkap mungkin tidak akan tercapai.

Pengungkapan BO merupakan pernyataan yang dibuat mengenai BO pada suatu waktu tertentu, alih-alih sebagai suatu kebenaran mutlak. Inilah fakta sesungguhnya untuk berbagai jenis informasi lain yang berkasnya rutin diserahkan oleh perusahaan, seperti laporan tentang aktivitas keuangan. Oleh karena itu diperlukan sistem verifikasi yang baik agar pengguna dapat mengandalkan data tersebut. Sistem verifikasi meningkatkan keandalan dengan:

- memberikan kejelasan tentang **asal-usul** data dan jenis pemeriksaan yang sudah dilakukan
- **mengurangi risiko** yang menyertai data palsu
- **memicu** alarm yang tepat ketika ada data BO palsu atau mencurigakan



Gambar 1: Langkah-langkah verifikasi data kepemilikan manfaat

Langkah 1

Pengiriman Data

Pengungkapan kepemilikan manfaat dikirimkan sebagai informasi tentang orang, entitas, dan hubungan pengendali di antara mereka ([halaman 5](#)).

Langkah 2

Verifikasi pada Saat Pengiriman

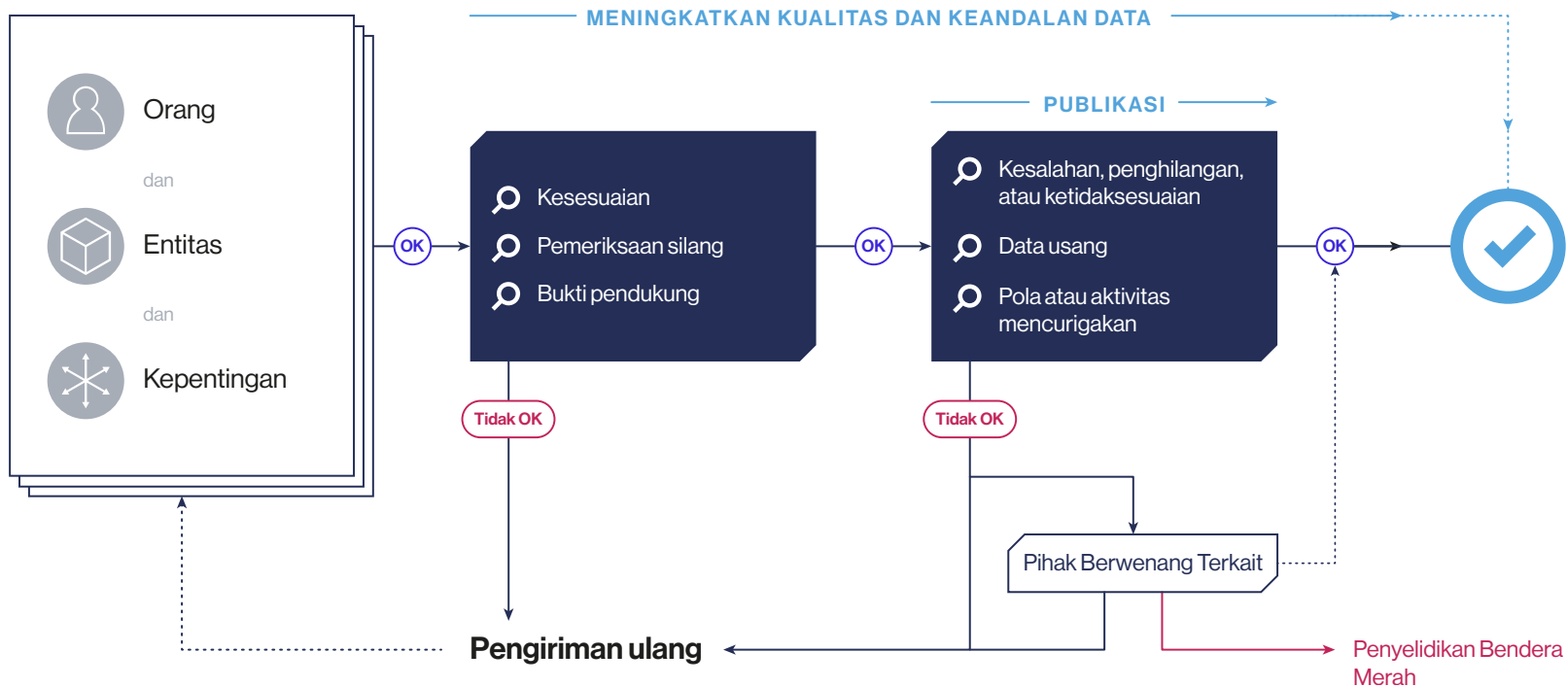
Sejumlah pemeriksaan verifikasi (kesesuaian, pemeriksaan silang, dan pemeriksaan bukti pendukung) dilakukan pada saat pengiriman ([halaman 5](#)). Data yang gagal dalam pemeriksaan ini perlu dikirim ulang. Data yang lulus dari pemeriksaan ini akan melalui sejumlah pemeriksaan menyusul pengiriman ([halaman 8](#)).

Langkah 3

Verifikasi Setelah Pengiriman

Kesalahan, penghilangan, dan ketidaksesuaian dilaporkan kepada petugas registrasi dan membutuhkan koreksi atau pengiriman ulang ([halaman 8](#)); data lama perlu dikirim ulang atau konfirmasi bahwa data tersebut masih benar ([halaman 9](#)); aktivitas atau pola yang mencurigakan pada data diteruskan kepada FIU dan mengalami triase sebagai positif palsu sehingga membutuhkan pengiriman ulang atau eskalasi untuk penyelidikan lebih lanjut ([halaman 9](#)).

Verifikasi merupakan proses yang terus berjalan: kualitas dan keandalan data meningkat seiring dengan setiap pemeriksaan verifikasi. Semua langkah verifikasi harus diterapkan dengan aturan sanksi yang menyeluruh, proporsional, dan disuasif ([halaman 11](#)).





Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua kasus verifikasi dan sistem verifikasi yang tepat untuk suatu aturan pengungkapan tertentu akan bergantung pada konteks lokal yang spesifik. Dokumen ini bermaksud memaparkan prinsip-prinsip umum yang menopang semua sistem verifikasi yang efektif. Selain itu, mereka yang menangani transparansi kepemilikan manfaat kadang-kadang menggunakan 'verifikasi' untuk mengacu kepada sejumlah hal yang berbeda. Informasi singkat ini memberikan kosakata umum bagi mereka yang menangani verifikasi data kepemilikan manfaat.

Jenis-jenis data salah yang dapat ditangani oleh sistem verifikasi

Sistem verifikasi yang baik akan dapat menangani:

- **Kesalahan tidak sengaja:** data yang dimasukkan salah secara tak disengaja (misalnya, pengejaan negara tempat tinggal secara salah)
- **Kepalsuan disengaja:** data salah yang dimasukkan dengan tujuan untuk menipu

Terdapat beragam metode dan mekanisme untuk verifikasi, dan kesemuanya itu memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda dalam hal menemukan kesalahan tidak disengaja dan kepalsuan yang disengaja. Biasanya, kesalahan tidak disengaja lebih mudah ditangani daripada kepalsuan disengaja.

Jenis-jenis pemeriksaan verifikasi

Verifikasi terdiri atas sejumlah pemeriksaan yang dapat dilakukan:

- pada saat pengiriman informasi BO
- setelah pengiriman informasi BO



Verifikasi pada saat pengiriman

Verifikasi pada saat pengiriman harus:

- Memastikan informasinya **sesuai dengan pola yang dikehendaki** dan bebas dari ambiguitas (misalnya, kode pos mengikuti format kode pos yang dikehendaki di negara tertentu; total saham tidak melampaui 100%)
- Memastikan informasinya mencerminkan **nilai yang benar-benar ada dan nyata** dengan **memeriksa silang** ke sistem otoritatif dan register pemerintah lainnya bilamana memungkinkan (misalnya, kode pos memang benar-benar ada)
- **Memeriksa bukti pendukung** dengan memeriksa informasi yang dikirimkan dan dibandingkan dengan dokumen aslinya (baik salinan cetak ataupun melalui identifikasi digital, misalnya bukti alamat; paspor untuk identitas pemilik atau pengirim; sertifikat saham untuk kepemilikan).

Pengungkapan BO terdiri atas tiga jenis informasi:

1. Informasi tentang orang-orang yang terlibat dalam hubungan kepemilikan atau pengendalian
2. Informasi tentang sifat kepemilikan atau pengendalian mereka
3. Informasi tentang perusahaan atau badan hukum lain yang mereka miliki atau kendalikan

Berbagai pemeriksaan verifikasi dapat dilakukan terhadap masing-masing pernyataan informasi tersebut. Aturan pengungkapan harus benar-benar dapat menghilangkan kekaburan identitas (disambiguasi) antara individu dan entitas yang berlainan, poin 1 dan 3, baik dalam jenis data yang dikumpulkan maupun mekanisme verifikasi yang digunakan. Poin 2, informasi tentang sifat kepemilikan atau pengendalian adalah yang paling sulit diverifikasi dan merupakan titik terjadinya sebagian besar

kepalsuan disengaja. Verifikasi terhadap masing-masing jenis informasi ini jauh lebih mudah dilakukan ketika datanya terstruktur (yaitu, tersusun secara rapi dan konsisten dalam field terpisah dan idealnya dapat dibaca mesin), daripada yang tidak terstruktur. Informasi tentang pengirim merupakan metadata yang sangat penting bagi ketiga pernyataan informasi di atas.

Pendekatan untuk memverifikasi tiga jenis informasi ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama seperti yang dipaparkan di bawah. Harus diingat bahwa satu pendekatan tidak menafikan pendekatan lainnya dan bahwa beberapa pendekatan itu saling melengkapi dan dapat saling memperkuat keandalan dan kualitas data.

Memastikan kesesuaian

Pemeriksaan kesesuaian

Apakah datanya mengikuti pola yang dikehendaki? Sebagai contoh, apakah format tanggal lahir sesuai dengan format yang biasanya dan apakah sistem menolak tanggal yang tidak dapat diterima, seperti 31 Februari?

Pemeriksaan kesesuaian merupakan alat yang efektif untuk menghapus kesalahan tidak disengaja. Implementasi pemeriksaan dalam format digital adalah relatif mudah dan murah. Akan tetapi, pemeriksaan ini kurang efektif dalam mengatasi kepalsuan disengaja.

Contoh: Belgia

Dalam Register-UBO Belgia (BO Akhir), sistem mencegah registrasi lebih dari 100% saham/hak pilih untuk seorang individu karena hal tersebut mustahil secara teknis sehingga memastikan data sesuai dengan pola yang dikehendaki.¹

¹ FATF, "Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons". Oktober 2019. Tersedia di: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf> [Diakses 20 April 2020].



Memastikan nilainya nyata dan ada

Memeriksa silang data

Apakah Anda dapat mencari detailnya dalam sistem yang otoritatif, seperti register pemerintah lainnya, untuk memeriksa keakuratannya? Sebagai contoh, apakah tanggal lahir dapat diperiksa silang ke pencatatan sipil atau apakah sistem ID Digital pemerintah dapat memverifikasi identitas?

Pemeriksaan silang data dapat diotomatiskan hingga tingkatan yang signifikan, dan lebih efektif daripada kesesuaian, baik secara umum maupun secara spesifik, dalam mengatasi kepalsuan disengaja. Pemeriksaan silang yang efektif membutuhkan infrastruktur dan kemampuan teknis dasar, termasuk di badan-badan pemerintah yang lain, sebagai penyedia data bagi pemeriksaan silang tersebut. Jika belum ada, amanat undang-undang yang baru harus dibuat agar dapat menggunakan data ini. Pemeriksaan ini bergantung pada keberadaan dan keakuratan register otoritatif (apakah data dalam register tersebut telah diverifikasi?). Pemeriksaan ini mungkin hanya mencakup warga negara dalam negeri, yang bergantung pada ketersediaan jenis informasinya.

Contoh: Tiongkok

Di Tiongkok, informasi kepemilikan manfaat sudah diperiksa silang dengan sejumlah register pemerintah yang lain, termasuk Administration of Industrial and Commercial Registration Information System, National Enterprise Credit Information Publicity System, Unified Social Credit Code Inquiry of National Organization System, Commercial Entity Registration Information Platform, Commercial Entity Credit Information Publicity Platform, dan Tax Registration Inquiry System.²

Contoh: Denmark

Danish Central Business Register (CVR) otomatis melakukan pemeriksaan silang dengan berbagai register pemerintah untuk informasi yang dikirimkan, termasuk register sipil dan register alamat Denmark. Sistemnya menolak, misalnya, registrasi orang yang sudah meninggal dunia.³

Memeriksa bukti pendukung

Sertifikasi atau notarisasi

Apakah seseorang yang memiliki otoritas (misalnya, pengacara atau notaris) telah memeriksa secara mandiri bukti dokumen yang menunjang data dan mengonfirmasikan kebenarannya? Sebagai contoh, apakah notaris dapat memastikan tanggal lahir seseorang dengan menjamin keakuratan pindaian paspor?

Pemeriksaan sertifikasi dapat digunakan untuk ketiga jenis informasi. Jenis pemeriksaan ini melibatkan orang pribadi pihak ketiga yang netral (sering kali di bawah sumpah) yang mempertaruhkan reputasi profesional atas klaim-klaim keakuratan dan bertanggung jawab atas penyerahan berkas yang salah. Pemeriksaan sertifikasi memang membutuhkan persyaratan dan pedoman yang ketat agar tidak jatuh ke dalam praktik pengiriman informasi yang menyimpang (lihat contoh di bawah). Untuk pemerintah yang secara teknis lebih sederhana, notarisasi sebagai sarana sertifikasi sering menjadi opsi yang dapat ditempuh, seperti yang dapat disaksikan di beberapa negara dengan penghasilan rendah.⁴ Penggunaan notaris dan pengacara dapat menjadi kendala biaya dalam melakukan perubahan dan relatif lebih mahal bagi perusahaan kecil sekaligus membutuhkan pemeriksaan verifikasi terhadap orang tersebut (misalnya, apakah pengacara ini memiliki izin praktik?).

Contoh: Slowakia

Di dalam Register of the Partners of the Public Sector di Slowakia, pihak ketiga – pengacara, notaris, bank, dan auditor – bertanggung jawab untuk memeriksa semua informasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika diketahui memberikan informasi palsu. Tinjauan OpenOwnership atas pengiriman telah menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam kualitas bukti pendukung sarana kepemilikan dan pengendalian, karena sebagian dokumen bernotaris hanya memberikan deskripsi naratif tanpa kejelasan yang memadai, sedangkan dokumen bernotaris yang lain menyertakan diagram struktur organisasi perusahaan yang jelas.

² Ibid

³ Ibid

⁴ Sebagai contoh, di Mali. Lihat GIABA, "Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Mali Mutual Evaluation Report". November 2019. Tersedia di: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/GIABA-Mutual-Evaluation-Mali-2019.pdf> [Diakses 20 April 2020].



Contoh: Jepang

Di Jepang, notaris wajib memeriksa identitas pemilik manfaat dengan memeriksa anggaran dasar dan dokumen lain yang dikirimkan. Mereka juga memeriksa identitas yang dibandingkan dengan basis data milik sendiri terkait kelompok kejahatan dan teroris internasional terorganisasi.⁵

Pemeriksaan Petugas Registrasi

Apakah petugas registrasi telah memeriksa bukti dokumen dan mengonfirmasi kebenarannya?

Pemeriksaan petugas registrasi dapat digunakan untuk ketiga jenis informasi dan makin meningkatkan keyakinan pada informasi yang disediakan. Jenis pemeriksaan ini membebaskan beban biaya dari pundak perusahaan jika dibandingkan dengan kewajiban sertifikasi oleh tenaga profesional pihak ketiga. Akan tetapi, petugas registrasi mungkin membutuhkan pelatihan tambahan terkait pemeriksaan keakuratan bukti dokumen. Jenis pemeriksaan ini juga perlu mempertimbangkan letak kewajiban secara cermat.

Memverifikasi pengirim

Upaya memverifikasi informasi tentang orang yang mengirimkan pengungkapan BO dapat memberikan perlindungan tambahan dari kiriman informasi palsu. Bergantung pada aturan pengungkapan, subjek verifikasi bisa pemilik manfaat, perwakilan perusahaan pengungkap, atau pihak ketiga. Informasi tentang pengirim pada dasarnya berupa metadata yang sangat krusial bagi peningkatan keandalan. Pemeriksaan verifikasi yang diuraikan di atas dapat digunakan untuk memverifikasi identitas pengirim informasi. Selain itu, perlu dipastikan bahwa orang yang bersangkutan memiliki otoritas untuk mengirimkan informasi atas nama BO atau perusahaan.

Sistem di atas tentu akan mengurangi kesalahan dan kepal-suan disengaja serta membantu meningkatkan kualitas data. Namun seseorang masih dapat menyamarkan pemilik manfaat yang sesungguhnya. Sebagai contoh, orang yang sesungguhnya, memiliki otoritas, dan terverifikasi bisa mengirimkan informasi atas nama perusahaan yang sah sekaligus mengirimkan informasi tentang orang yang sesungguhnya dan terverifikasi yang bukan merupakan pemilik manfaat dengan tujuan menyamarkan BO yang sesungguhnya. Terdapat mekanisme verifikasi tambahan yang dapat digunakan setelah pengiriman untuk meningkatkan kualitas data lebih lanjut.

⁵ FATF, "Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons". Oktober 2019. Tersedia di: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf> [Diakses 20 April 2020].



Verifikasi setelah pengiriman

Verifikasi setelah pengiriman harus:

- Memastikan data **sering diperiksa**
- Memastikan data **selalu mutakhir**
- Memastikan **penyelidikan informasi yang diduga tidak benar**

Terdapat sejumlah pendekatan umum verifikasi setelah pengiriman, termasuk pemeriksaan setelah publikasi informasi BO. Sama halnya dengan pemeriksaan verifikasi pada saat pengiriman, beberapa pendekatan dapat digunakan sekaligus untuk saling melengkapi dan saling memperkuat keandalan dan keakuratan.

Memastikan data sering diperiksa

Menjadikan register BO bersifat terbuka dan publik

Upaya menjadikan register bersifat publik akan memudahkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan khalayak umum baik dalam memeriksa kesalahan tidak disengaja maupun kepalsuan disengaja. Penelitian menunjukkan bahwa penerbitan data secara publik dapat meningkatkan kualitas data karena meningkatnya penggunaan data akan meningkatkan peluang identifikasi inkonsistensi atau perbuatan salah.⁶ Agar publikasi data ini berjalan efektif sebagai suatu tindakan verifikasi, harus ada mekanisme untuk memudahkan pelaporan kesalahan, ketidaksesuaian, dan informasi yang kontradiktif. Terdapat juga serangkaian manfaat lain bagi sektor swasta yang kesemuanya diharapkan jauh lebih bernilai daripada biaya yang dikeluarkan.⁷

Meskipun tidak ada contoh terdokumentasi mengenai bahaya yang timbul akibat register publik,⁸ para penentang register publik sering mengutip isu privasi sebagai argumen tandingan. Pemerintah tidak boleh mengungkapkan data melebihi yang seharusnya untuk memberikan pengawasan dan transparansi yang bermakna serta dapat memasukkan pembebasan jika ada pertimbangan yang sah.

Contoh: Inggris Raya

Pada November 2016, Global Witness dan konsorsium LSM menganalisis 1,3 juta perusahaan di dalam register Orang dengan Pengendalian Signifikan di Inggris Raya. Mereka dapat menginformasikan lebih dari 4.000 perusahaan dengan informasi yang tidak layak kepada Companies House – badan pengawas register.⁹

Pengujian/pemeriksaan sampel

Badan-badan yang bertanggung jawab atas register BO dapat melakukan penyelidikan mendalam terhadap sampel data atau meminta pihak luar untuk melakukannya. Pengujian ini menjadi gertakan bagi perusahaan untuk mengirimkan informasi yang salah. Pengujian sampel bisa jadi bukan mekanisme verifikasi yang sangat efektif dan dapat sangat menguras sumber daya. Kelemahan ini dapat diminimalkan dengan menggunakan pendekatan pengujian sampel berbasis risiko.

⁶ OpenOwnership, "Briefing: The case for beneficial ownership as open data". Juli 2017. Tersedia di: <https://www.openownership.org/uploads/briefing-on-beneficial-ownership-as-open-data.pdf> [Diakses 20 April 2020].

⁷ OpenOwnership, "Briefing: The case for public beneficial ownership registers". Juli 2017. Tersedia di: <https://www.openownership.org/uploads/the-case-for-public-beneficial-ownership.pdf> [Diakses 20 April 2020].

⁸ OpenOwnership, The B Team and The Engine Room, "Data Protection and Privacy in Beneficial Ownership Disclosure". Mei 2019. Tersedia di: <https://www.openownership.org/uploads/oo-data-protection-and-privacy-188205.pdf> [Diakses 20 April 2020].

⁹ Global Witness, "The Companies We Keep". 2016. Tersedia di: https://www.globalwitness.org/documents/19400/Briefing_The_Companies_We_Keep.pdf [Diakses 20 April 2020].



Contoh: Denmark

Untuk memastikan keakuratan dan kemutakhiran informasi BO di dalam Central Business Register (CVR), Danish Business Authority (DBA) secara manual mulai memeriksa 500 perusahaan dan registrasi pemilik manfaat mereka pada 2019.¹⁰

Memastikan data selalu mutakhir

Mebutuhkan pembaruan informasi jika ada perubahan

Perubahan BO wajib diperbarui dengan cepat setelah perubahan. Penetapan jangka waktu yang singkat dan tertentu untuk mengirimkan perubahan ke sebuah register akan memastikan kemutakhiran informasi BO. Register publik juga dapat menampilkan keusangan informasi secara publik untuk memperingatkan pengguna data. Kewajiban mengirimkan pembaruan secara sering ke register berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan, yang harus menjadi faktor pertimbangan dalam rancangan sistem verifikasi.

Mewajibkan konfirmasi atas informasi yang ada

Entitas pengungkap harus rutin memeriksa dan mengonfirmasikan (minimal setahun sekali) bahwa informasi BO mereka sudah akurat dan mutakhir. Upaya pemeriksaan dan konfirmasi ini dapat diintegrasikan ke dalam proses bisnis yang ada (misalnya, saat mengirimkan laba tahunan). Namun tanpa pemeriksaan verifikasi yang lain, langkah ini tidak akan efektif.

Contoh: Ukraina

Agar dapat memastikan bahwa pembaruan informasi tentang pemilik manfaat berjalan secara terus-menerus, Kementerian Hukum Ukraina mengeluarkan Perintah No. 2824/5 “Tentang Perubahan Formulir Aplikasi Tertentu di Bidang Registrasi Negara untuk Entitas Hukum, Pengusaha Individu, dan Organisasi Publik” pada 2018, yang mewajibkan perusahaan untuk memperbarui informasi tentang pemilik manfaat akhir mereka ketika mengubah informasi apa pun di Unified State Register atau mengonfirmasikan bahwa informasi yang dimiliki masih benar.¹¹

Memastikan penyelidikan terhadap informasi yang diduga tidak benar

Mebutuhkan pelaporan entri dan aktivitas mencurigakan

Badan-badan yang menangani data BO wajib melaporkan pengiriman dan aktivitas mencurigakan kepada badan-badan berwenang terkait. Badan-badan ini harus diberi amanat untuk menyelidiki hal tersebut (misalnya, sektor swasta yang melakukan proses uji tuntas dapat melapor ke Lembaga Intelijen Keuangan (FIU) terkait laporan tentang tindak pidana pencucian uang). Harus diperhatikan bahwa FIU harus mendapatkan sumber daya yang tepat agar dapat menyelidiki laporan tersebut (lihat contoh).

Contoh: Inggris Raya

Sejak Januari 2020, sektor yang diatur dalam regulasi anti tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kontraterorisme [AML/CTF] wajib melaporkan ketidaksesuaian antara informasi kepemilikan manfaat yang tersedia di Companies House dan informasi yang diperoleh lewat pemeriksaan kepatuhannya sendiri.¹²

Contoh: Belanda

Tindak pidana pencucian uang sekitar €16 miliar terjadi di Belanda setiap tahun. Meskipun entitas yang berwenang melaporkan 60.000 transaksi mencurigakan pada 2018, FIU hanya menganggap 15.000 saja yang benar-benar mencurigakan, bahkan diduga hanya mampu menyelidiki jauh lebih sedikit lagi akibat minimnya sumber daya (manusia).¹³

Pengibaran bendera merah

Sistem dapat dipersiapkan untuk mendeteksi pola-pola terkait sarana hukum yang digunakan untuk tujuan ilegal. Kemungkinan besar hal ini sangat bergantung pada konteks. Sistem ini akan lebih mudah dipersiapkan dalam bentuk sistem digital dengan informasi BO sebagai data terstruktur dan dapat mengadopsi teknologi AI serta pembelajaran mesin. Ada risiko bahwa ketika terdapat penambahan pemeriksaan pengibaran bendera merah dan pemeriksaan silang informasi BO dengan register tambahan, jumlah entri yang diberi bendera secara keliru

¹⁰ FATF, “Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons”. Oktober 2019. Tersedia di: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf> [Diakses 20 April 2020].

¹¹ Berdasarkan “Concept of a mechanism for verifying the reliability of information on UBO” yang dibagikan kepada OpenOwnership oleh grup kerja verifikasi “Up to 100%” serta diskusi bersama anggota grup kerja tersebut pada Februari 2020.

¹² HM Treasury, “The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations”. 2019. Tersedia di: <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1511/made/data.pdf> [Diakses 20 April 2020].

¹³ Trouw, “Belastingadviseurs: ‘Overheid is te slap tegen witwassen’”. 9 Februari 2020. Tersedia di: <https://www.trouw.nl/economie/belastingadviseurs-overheid-is-te-slap-tegen-witwassen-b0f40eff/> [Diakses 20 April 2020].



sebagai mencurigakan juga akan meningkat sehingga mengurangi kegunaannya. Oleh karena itu, mekanisme untuk mengurangi kesalahan tersebut juga harus dipertimbangkan, di samping memperkenalkan proses bisnis yang ringan dan berbasis aturan yang tanggap terhadap ketidaksesuaian tersebut.

Contoh: Ukraina

Di Ukraina, grup kerja verifikasi “Up to 100%” telah mengusulkan sejumlah sistem verifikasi yang mengibarkan bendera merah otomatis berdasarkan struktur yang sudah dikenal yang digunakan untuk tujuan ilegal. Sebagai contoh, di Ukraina, pencantuman karyawan pabrik sebagai BO sudah menjadi kelaziman. Sistem usulan ini akan otomatis mengibarkan bendera merah bagi penyelidik ketika seseorang dicantumkan sebagai BO dari sebuah perusahaan yang meraup untung besar padahal data pajak menunjukkan bahwa orang tersebut menerima upah jauh lebih rendah daripada yang semestinya diterima dari seorang pemilik perusahaan yang meraup untung besar.¹⁴

Sebagian besar aturan pengungkapan kepemilikan manfaat akan menggunakan sejumlah mekanisme verifikasi di atas, yang harus diakui belum mencakup semuanya, tetapi semuanya secara umum masuk ke dalam tiga pendekatan. Tidak ada satu pendekatan pun yang lebih baik dari yang lain sehingga keberhasilan suatu pendekatan akan sangat bergantung pada konteks penggunaannya dan keberadaan pemeriksaan yang lain. Oleh karena itu, negara harus menempuh pendekatan verifikasi yang utuh dan menyeluruh, dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko dan selalu mengingat tujuan utama sistem verifikasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan memfasilitasi penggunaan data dan yang, pada gilirannya, dampak kebijakan.

¹⁴ Berdasarkan “Concept of a mechanism for verifying the reliability of information on UBO” yang dibagikan kepada OpenOwnership oleh grup kerja verifikasi “Up to 100%” serta diskusi bersama anggota grup kerja tersebut pada Februari 2020.



Sanksi

Semua langkah verifikasi harus diterapkan dengan aturan sanksi yang menyeluruh, proporsional, dan disuasif, termasuk denda uang dan penalti lain agar dapat meningkatkan kepatuhan dan kualitas data, yang dapat meliputi:

- Orang yang mengirimkan pernyataan BO (yaitu, notaris)
- Pegawai terdaftar perusahaan
- Pemilik manfaat
- Perusahaan yang melakukan pengungkapan

Sanksi harus mencakup kegagalan mengirimkan informasi, mengirimkan informasi yang salah (disengaja atau tidak), atau tidak mengirimkan informasi tepat waktu. Sanksi dapat diperluas hingga mencakup penalti atas kegagalan melaporkan informasi mencurigakan di bawah kewajiban pelaporan AML. Denda bukan uang dapat meliputi pencabutan hak kewarganegaraan dan hak terkait bisnis tertentu, seperti tidak dapat mendaftarkan perusahaan atau tidak dapat menerima dividen dari saham.

Contoh: Prancis

Di Prancis, pengiriman yang terlambat atau salah bisa mengakibatkan seseorang tidak dapat menggeluti aktivitas bisnis tertentu atau tercabut sebagian hak kewarganegaraan atau sipilnya, seperti mendapatkan pengawasan hukum. Selain itu, orang yang bersangkutan dapat dikenai hukuman enam bulan kurungan dan denda sebesar €7.500. Sanksi bagi perusahaan adalah lima kali lipat sanksi bagi individu.¹⁵

Contoh: Ghana

Di Ghana, denda karena tidak memperbarui informasi adalah sebesar USD350¹⁶ yang, menurut sumber lokal, dianggap sedemikian rendah oleh sebagian perusahaan sehingga mereka lebih memilih membayar denda daripada memperbarui informasi.

¹⁵ FATF, "Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons". Oktober 2019. Tersedia di: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf> [Diakses 20 April 2020].

¹⁶ EITI, "Legal approaches to beneficial ownership transparency in EITI countries". Juni 2019. Tersedia di: https://eiti.org/files/documents/legal_approaches_to_beneficial_ownership_transparency_in_eiti_countries.pdf [Diakses 20 April 2020].



Kesimpulan

Verifikasi merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai pemeriksaan dan proses yang dapat diterapkan di berbagai tahap sistem pengungkapan BO yang berbeda, diterapkan dengan sanksi yang proporsional, dengan tujuan menciptakan data berkualitas tinggi dan andal serta memaksimalkan kegunaan dan dampak register BO.

Dalam praktiknya, verifikasi ini mensyaratkan keberadaan kerangka hukum yang tepat (misalnya, kerangka hukum yang memperbolehkan lembaga pemerintah untuk membagikan informasi), sistem perangkat lunak dan perangkat keras yang efektif serta proses administrasi yang mengimplementasikan persyaratan kerangka hukum dengan cara yang dapat memaksimalkan penggunaan data BO dalam memberikan dampak kebijakan. Meskipun upaya menimbang secara matang kelebihan berbagai kombinasi pendekatan verifikasi di awal itu penting, pemerintah harus menyikapi pengungkapan kepemilikan manfaat sebagai proyek yang berkelanjutan. Proyek pengungkapan ini harus dilaksanakan secara langkah demi langkah sambil terus mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan, menutup celah hukum, dan memperkuat penggunaan informasi dan data.

Verifikasi data kepemilikan manfaat merupakan bidang yang berkembang pesat tetapi relatif masih baru, dan bidang-bidang dengan praktik yang baik masih terus bermunculan. Sebagai contoh, upaya pemeriksaan verifikasi terhadap warga negara dalam negeri jauh lebih mudah untuk dilakukan daripada terhadap warga negara asing. Seiring makin banyaknya negara yang membangun register BO publik dengan sistem verifikasi yang saling terkait, potensi capaian melalui verifikasi data BO yang mantap juga akan meningkat. Hal-hal terkait verifikasi juga cukup banyak yang bisa digali dari sektor swasta serta register tertutup.¹⁷ Akan tetapi, sedikit informasi tentang hal ini yang tersedia di ranah publik, seperti yang ditunjukkan oleh lingkup geografis terbatas dari contoh-contoh dalam informasi singkat ini. Sebagai salah satu cabang penelitiannya, OpenOwnership berusaha menyelidiki penggunaan data BO oleh sektor swasta berikut mekanisme verifikasi yang mereka gunakan, di samping juga melakukan studi kasus terhadap mekanisme verifikasi di register tertutup. Dengan makin banyaknya negara lain yang mengimplementasikan transparansi kepemilikan manfaat, OpenOwnership akan terus mempelajari dan memperbarui pemikirannya tentang praktik verifikasi terbaik.

¹⁷ Lihat, misalnya: Andres Knobel, "Beneficial ownership verification: ensuring the truthfulness and accuracy of registered ownership information", Tax Justice Network. 2019. Tersedia di: https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2019/01/Beneficial-ownership-verification_Tax-Justice-Network_Jan-2019.pdf

Publikasi oleh Open Ownership

Penulis Tymon Kiepe

dengan kontribusi dari
Louise Russell-Prywata dan Jack Lord

Ditinjau oleh Andres Knobel

Diedit oleh Victor Ponsford

Desain oleh Convincible Media

openownership.org

 @openownership

1 St. Katherine's Way, London E1W 1UN

**Open
Ownership**

